



Peristiwa Tanjung Priok 1984 (Sebuah Gerakan Sosial)

Tanjung Priok Incident 1984 (Social Movement)

Umi Kholisya¹✉

¹✉ Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: umi.kholisya@gmail.com✉

Diterima: 20 November 2023

| Direvisi: 30 November 2023

| Diterbitkan: 2 Desember 2023

ARTICLE INFO

Keywords:

Tanjung Priok,
Movement Social,
Incident.

ABSTRACT

Pancasila is a way of life of the Indonesian people. During its development, the New Order government made Pancasila the only principle. This government policy gave rise to protests by the community, especially Islamic mass organizations. As a result of the reaction of Islamic community organizations (ormas), the government considered that these movements rejected the Pancasila ideology and were dangerous for the unity of the country. One form of reaction to this government policy was the explosion of the 1984 Priok Incident. This incident occurred on September 12 1984. The method used is descriptive analytical historical research which consists of several stages, namely topic selection, source collection (heuristics), source criticism, interpretation, and historiography. The sources used are oral sources and written sources. The 1984 Priok incident cannot be separated from what is stated in the Collective Action Theory, namely a social movement based on certain interests and to achieve its goals, mobilization efforts or activities are carried out, while the nature of the action is reactive. In their efforts to prevent past humanitarian violations from being revealed, those responsible for security (security forces) in the period after the Priok incident tried to approach the victims, tried to cooperate and tried to get guarantees so that the 1984 Priok case would not be brought to court. This guarantee is applied in the form of peace called Ishlah.

Kata Kunci:

Tanjung Priok,
Gerakan Sosial,
Insiden.

Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada perkembangannya, pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan protes oleh masyarakat, khususnya ormas Islam. Akibat dari reaksi organisasi masyarakat (ormas) Islam, pemerintah menganggap bahwa gerakan-gerakan ini melakukan penolakan terhadap ideologi Pancasila dan membahayakan bagi persatuan negara. Salah satu bentuk reaksi kebijakan pemerintah ini adalah meledaknya Peristiwa Priok 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah deskriptif analisis yang terdiri dari beberapa tahap yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah sumber lisan dan sumber tertulis. Peristiwa Priok 1984 tidak terlepas dengan yang disebutkan dalam Teori *Collective Action* adalah sebuah gerakan sosial yang berdasarkan kepentingan tertentu dan untuk mencapai tujuannya dilakukan usaha mobilisasi atau kegiatan-kegiatan, adapun sifat dari aksinya adalah reaktif. Dalam upayanya untuk mencegah agar pelanggaran kemanusiaan pada masa lalu yang tak terungkap, penanggungjawab keamanan (aparatus keamanan) pada masa setelah peristiwa Priok mencoba mendekati korban, berusaha bekerja sama dan berusaha mendapatkan jaminan agar kasus Priok 1984 tidak dibawa ke pengadilan. Jaminan itu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan ideologi Pancasila, nilai Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap sesuai peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Pada perkembangannya, pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan keinginan Presiden Soeharto dan didukung oleh Hasil seminar II Angkatan Darat pada tanggal 2 April 1981 dan pidato-pidato kepresidenan antara lain tanggal 16 Agustus 1982 dan 1 Oktober 1982 (Feiliard, 2008). Upaya itu dilakukan secara sistematis sebenarnya sejak tahun 1978 ketika diterbitkan Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (Tanuredjo, 2005). Hal ini dipertegas kembali pada Sidang Umum MPR 1983 pada Tap MPR No.II/ MPR/ 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV D Pasal 3 yang isinya "...Demi kelestarian dan Pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan

sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (Tanuredjo, 2005).

Kebijakan pemerintah ini banyak menimbulkan protes oleh masyarakat, khususnya ormas Islam. Pada masa ini banyak terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Di antara ormas Islam yang berani menentang rencana kebijakan pemerintah mengenai satu-satunya asas adalah Islam modernis radikal Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang mengeluarkan reaksi keras begitupun dengan Nahdlatul Ulama yang membentuk sebuah kelompok kerja untuk menelaah kasus ini. Reaksi-reaksi yang ditimbulkan beragam, salah satunya dengan cara melakukan ceramah mengkritik kebijakan mengenai satu-satunya asas Pancasila. Selain itu, semua agama besar yang diakui secara resmi mengeluarkan pernyataan bersama menolak gagasan tersebut pada tanggal 6 November 1982. Meskipun mereka juga menyatakan selalu membuat umat mereka menjadi orang yang beragama dan pancasilais (Feiliard, 2008).

Akibat dari reaksi organisasi masyarakat (ormas) Islam, pemerintah menganggap bahwa gerakan-gerakan ini melakukan penolakan terhadap ideologi Pancasila dan membahayakan bagi persatuan negara. Salah satu bentuk reaksi kebijakan pemerintah ini adalah meledaknya Peristiwa Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12

September 1984. Peristiwa ini merupakan peristiwa berdarah yang memakan banyak korban.

Masalah ini banyak menimbulkan kontroversi terutama di kalangan umat Islam. Peristiwa ini digambarkan oleh pers Indonesia sesuai dengan versi pemerintah (PSPI, 1998). Deskripsi dan publikasi tentang peristiwa Tanjung Priok yang beredar di kalangan masyarakat cenderung bersumber dari versi pemerintah. Namun ada beberapa versi lainnya yang ikut mengklarifikasi peristiwa Tanjung Priok ini. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk merekonstruksi dan mendeskripsikan peristiwa ini dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini mengambil sebuah objek Peristiwa Tanjung Priok 1984 karena peristiwa ini merupakan konflik sosial politik yang dampaknya berkepanjangan hingga saat ini. Maksudnya masalah kompensasi yang dijanjikan pihak militer dalam piagam *Ishlah* yang masih menyisakan persoalan. Meskipun, terjadinya peristiwa ini berada dalam suatu wilayah lokal di Tanjung Priok, tepatnya di kecamatan Koja, Jakarta Utara menjadi problematika tingkat nasional bahkan sampai lingkup internasional.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian sejarah deskriptif analisis yaitu mengadakan peninjauan secara kritis tentang fakta-fakta empiris masa lalu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sesuai dengan kajian yang diteliti. Pendekatan historis deskriptif analisis digunakan agar peneliti dapat merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi-

kan fakta serta mensintesis fakta-fakta yang telah diperoleh untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat (Gottschalk, 1986). Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Furchan, 1992).

Dalam penelitian ini digunakan ilmu bantu sosiologi untuk bisa menjelaskan peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan Peristiwa Tanjung Priok 1984 melalui teori gerakan sosial dan secara khusus menggunakan teori *Collective Action*. Teori *Collective Action* adalah sebuah gerakan sosial yang berdasarkan kepentingan tertentu dan untuk mencapai tujuannya dilakukan usaha mobilisasi atau kegiatan-kegiatan, adapun sifat dari aksinya adalah reaktif.

Seorang sejarawan harus mengetahui metode penulisan sejarah. Metode penulisan sejarah adalah bagaimana mengetahui sejarah (Sjamsuddin, 1994: 3). Dalam penelitian sejarah ada 5 tahap yang harus dilakukan yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber atau heuristik, (3) verifikasi atau kritik, (4) interpretasi, (5) penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijaya, 2001). Pada penelitian mengenai Peristiwa Tanjung Priok ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa beberapa arsip seperti surat kabar sezaman dan beberapa dokumen berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selain itu wawancara dilakukan terhadap beberapa korban Peristiwa Tanjung Priok yang masih hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Masyarakat Tanjung Priok 1984

Pada umumnya masyarakat di wilayah Jakarta Utara menyebut daerah Tanjung Priok untuk hampir semua daerah di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok.

Tanjung Priok adalah satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Terletak di Teluk Jakarta dan memanjang dari Kamal sampai Marunda di Timur. Kawasan Koja (disebut pula kawasan Priok seperti yang dibahas sebelumnya) adalah tempat terjadinya Peristiwa Priok.

Tanjung Priok merupakan kota yang cukup ramai dengan berbagai aktivitasnya. Kawasan ini adalah kawasan padat penduduk, yang merupakan kawasan daerah hunian kaum buruh karena kawasan ini banyak terdapat pabrik dan kebanyakan kaum buruh bekerja harian yang dikenal sebagai pekerja serabutan. Selain itu ragam pekerjaan lainnya adalah sebagai buruh nelayan, buruh jasa transportasi dan pedagang.

Penduduk yang menjadi buruh umumnya datang dari berbagai daerah seperti Banten, Madura, dan Sulawesi Selatan seperti yang diungkapkan Bapak Yusron korban peristiwa Priok 1984.

Kondisi perekonomian yang kurang menunjang kehidupan secara layak membuat para pendatang ini membangun seadanya. Mereka adalah perantau-perantau yang mempertaruhkan daripada tidak mendapat pekerjaan di daerahnya, mereka menjalani kehidupan yang keras. Jalan raya di daerah ini setiap hari dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk pelabuhan sehingga menjadikan daerah ini terlihat sibuk, karena

letaknya dekat dengan pelabuhan maka banyak pendatang dari luar Jakarta maupun dari luar Pulau Jawa bekerja dan menetap di sana. Hal sama diungkapkan oleh Syafwan bin Sulaiman mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Priok dalam wawancara pada tanggal 10 Juli 2010.

Penduduk pada wilayah ini sangat beragam. Mereka pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang sadar hukum, oleh sebab itu banyak dari mereka yang membangun rumah tanpa kekuatan hukum. Masalah seperti ini membuat pemerintah sulit dalam melaksanakan program untuk membenahi tata ruang kota. Secara umum semangat juang warga untuk meningkatkan taraf hidup cukup tinggi, namun semangat ini menyusut dikarenakan banyak larangan untuk membuka usaha karena alasan-alasan ketertiban.

Pendidikan masyarakat sekitar menjadi salah satu faktor penting penyebab Peristiwa Priok 1984. Menurut Bapak Yusron pada era tahun 1980-an sekolah SMA jumlahnya sangat terbatas, perguruan tinggi di wilayah ini juga hanya satu pada saat itu. Berdasarkan data-data saksi pada berkas Berita Acara Pendapat (Resume) kasus Priok dengan terdakwa Mayjend. Pranowo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2001 dapat diketahui status pendidikan yang relatif minim. Kebanyakan saksi berpendidikan SMP dan berpendidikan SD hanya sedikit yang berpendidikan SMA serta jenjang pendidikan tinggi. Saksi-saksi tersebut bisa menjadi gambaran tingkat pendidikan warga sekitar lokasi peristiwa. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu pemicu mudahnya masyarakat dipengaruhi oleh

hal-hal baru termasuk ajaran agama. Mereka juga mudah terhasut oleh propaganda, apalagi jika menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan mereka sebagai warga negara.

Kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari mobilisasi masyarakat kota. Begitupun dengan kawasan Priok ini. Jika melihat dari data BPS DKI Jakarta tahun 1985 tercatat 125 frekuensi pencurian yang terjadi, 8 frekuensi perampokan, 12 frekuensi pembunuhan dan 40 frekuensi angka pemerkosaan. Terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi cukup tinggi. Salah satu daerah rawan kriminalitas di Jakarta Utara terdapat di Kramat Tunggak.¹

Rekonstruksi Peristiwa Tanjung Priok 1984

Seperti yang pernah disebutkan di atas bahwa ketegangan antara negara dan masyarakat hanya tinggal menunggu saja. Peristiwa Tanjung Priok dalam masyarakat mempunyai beberapa versi yang berbeda. Bila dirinci versi yang berkembang di masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Versi Resmi Pemerintah Orde Baru

Versi resmi peristiwa Tanjung Priok dikeluarkan sekitar sepuluh jam setelah peristiwa ini terjadi. Keterangan resmi pemerintah Orde Baru dikemukakan oleh Pangab/Pangkopkamtib L.B. Moerdani didampingi oleh Menteri Penerangan Harmoko, Pangdam V/Jaya Try Soetrisno, dan Kapolda Metro Jaya Drs. Soedjoko. Keterangan resmi peristiwa Tanjung Priok diterima publik diuraikan oleh Pangab

sebagai berikut². Di sekitar Masjid Rawabadak terpasang pamflet dan poster yang menghasut bersifat SARA. Karena imbauan petugas agar pamflet-pamflet dan poster-poster itu dihapus atau dicabut tidak dihiraukan, seorang petugas, pada hari jumat tanggal 7 September 1984, menutup tulisan-tulisan yang bersifat menghasut itu dengan warna hitam.

Pada hari senin, 10 September 1984, seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya di daerah Koja, dihadang dan kemudian dikeroyok oleh sekelompok orang. Petugas keamanan berhasil menyelamatkan diri, tetapi sepeda motornya dibakar oleh para penghadang. Aparat keamanan pun menangkap empat orang pelakunya untuk keperluan pengusutan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada hari Rabu, 12 September 1984, pukul 19.30 WIB, di Masjid Rawabadak berlangsung ceramah agama tanpa izin dan bersifat menghasut. Penceramahnyanya antara lain Amir Biki (tewas tertembak), Syarifin Maloko (tertangkap setelah semua sidang perkara Tanjung Priok selesai), M. Nasir (bukan M. Natsir mantan Perdana Menteri dan ketua DDII), tidak pernah diketahui keberadaannya setelah peristiwa malam itu. Pukul 22.00 WIB aparat keamanan menerima telepon dari Amir Biki yang berisi ancaman pembunuhan dan perusakan apabila

¹ Dulu daerah ini adalah lokalisasi yang terkenal di DKI Jakarta, Rawa Badak serta Kebun Bawang. Kramat Tunggak sekarang telah menjadi Islamic Center (Lihat kompas 16 September 1984).

² Lihat Koran Sinar Harapan 14 September 1984 "Situasi Ibukota Normal Kembali". Kompas 14 September 1984 "Penjelasan Resmi Pangkopkamtib tentang Peristiwa Tanjungpriok", "Tanya Jawab mengenai Kerusakan Tanjungpriok. Majalah Tempo 22 September 1984 "Huru Hara di Tanjungpriok". Lihat juga Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2007. **Sejarah Nasional Indonesia VI**. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 642-644.

keempat tahanan tidak dibebaskan. Sekitar pukul 23.00 WIB ancaman telepon diulang lagi.

Setelah itu, sekitar 1.500 orang menuju Polres dan Kodim. Lima belas orang petugas keamanan menghambat kerumunan atau gerakan massa tersebut. Regu keamanan berusaha membubarkan massa dengan secara persuasif, namun dijawab dengan teriakan-teriakan yang membangkitkan emosi dan keberingasan massa. Massa terus maju mendesak satuan keamanan sambil mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan celurit. Dalam jarak yang sudah membahayakan, regu keamanan mulai memberikan tembakan peringatan dan tidak dihiraukan. Tembakan diarahkan ke tanah dan kaki penyerang, korban pun tidak dapat dihindari. Setelah datang pasukan keamanan lainnya, barulah massa mundur, tetapi mereka membakar mobil, merusak beberapa rumah, dan apotek. Sekitar tiga puluh menit kemudian gerombolan menyerang kembali petugas keamanan, sehingga petugas keamanan dalam kondisi kritis dan terpaksa melakukan penembakan-penembakan untuk mencegah usaha perusuh merebut senjata dan serangan-serangan dengan celurit dan senjata tajam lainnya. Hari Kamis, 13 September 1984, pukul 00.00 WIB, pasukan keamanan Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) Jaya berhasil mengendalikan situasi, menguasai keadaan, dan membubarkan massa. Menurut Pangab dalam versi ini, 9 orang meninggal dan 53 luka-luka.

b. Versi Intern Aparat Pemerintahan Orde Baru

Versi kedua ini diungkapkan oleh Pangab/Pangkopkamtib dalam penjelasan kepada lurah wilayah Jakarta Utara (Tempo, 22 September 1984). Penjelasan Pangab/Pangkopkamtib sebagai berikut:

Jumat, 7 September, di sekitar Masjid Rawabadak banyak tertempel pengumuman tentang ceramah oleh mubalig-mubalig yang terkenal ekstrem, keras, bukan mubalig ayam sayur. Salah seorang petugas Koramil setempat, yang merasa terhina karena peringatan-peringatannya pada panitia untuk tidak mengundang penceramah seperti itu – mubalig keras-- selalu diabaikan, menyiram salah satu pengumuman dengan air selokan.

Senin, 10 September 1984, petugas yang menyiram pengumuman dengan air selokan itu lewat di depan sekelompok pemuda yang sedang berada di Pasar Koja. Mereka segera menghadangnya dan mencoba mengeroyok petugas tersebut. Pada saat itu ada dua warga yang mencoba menyelamatkan petugas itu. Setelah itu para pengeroyok mencoba melampiaskan kemarahan mereka dengan membakar sepeda motor dinas yang digunakan petugas itu. Selanjutnya, sesuai prosedur hukum yang berlaku, Polres Jakarta Utara terpaksa menahan dua orang penyelamat itu dan dua orang lagi yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan untuk dimintai keterangan. Penahanan sementara diperlukan oleh aparat keamanan guna penelitian dan pengusutan lebih lanjut serta guna penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rabu, 12 September 1984, sekitar pukul 19.30 WIB, di Masjid Rawabadak berlangsung ceramah agama oleh Amir Biki, Syarifin Maloko, S.H., dan M. Nasir. Para penceramah melontarkan ucapan-ucapan anti-Pancasila, anti satu-satunya asas Pancasila, memecah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengganggu stabilitas nasional (Surat Pangkopkabtimda Jaya kepada Kejati DKI Jakarta, 13 September 1984). Di akhir ceramahnya, Amir Biki yang dikenal masyarakat setempat sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh, mengajak pendengar agar ramai-ramai mendatangi Polres Jakarta Utara untuk menuntut agar empat orang, yang sebenarnya hanya ditahan sementara guna dimintai keterangan, dibebaskan saat itu juga. Sekitar pukul 23.00 WIB peserta ceramah beramai-ramai mendatangi Polres Jakarta Utara, dipimpin Amir Biki yang membawa bendera hijau. Karena gerakan ini sudah tercium sebelumnya, pengamanan Polres Jakarta Utara diperkuat pasukan Laksusda Jaya. Sesampainya massa di depan Polres, terjadi perundingan antara Amir Biki dan Komandan Laksusda Jaya dan Danres (Kapolres) Jakarta Utara.

Sementara itu, para pengikut Amir Biki mulai berteriak-teriak mencaci petugas keamanan. Mereka memaksa agar empat orang temannya dibebaskan saat itu juga. Akhirnya, karena massa terus mendesak maju dan karena sakit hati dicaci maki terus menerus, petugas keamanan sebagai biasanya manusia, hilang kesabarannya. Maka tanpa dapat dicegah, sebagian petugas keamanan membidikkan senjata mereka ke

arah massa. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sekitar 40 orang tewas tertembak saat itu juga, termasuk Amir Biki, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selanjutnya, para peserta ceramah sambil meneriakkan "*Allahu Akbar*" mengamuk dan membakar toko-toko milik orang Tionghoa hingga jatuh korban orang-orang Tionghoa yang mencapai 100 orang lebih. Kamis, 13 September 1984, pukul 00.00 WIB, aparat keamanan Laksusda Jaya berhasil mengendalikan situasi, menguasai keadaan, dan membubarkan massa.

Menurut Dokumen Kepolisian Jakarta Utara³, kerugian material yang diakibatkan peristiwa Priok 1984 yaitu kerusakan sejumlah barang; 12 mobil rusak, 4 kendaraan sepeda motor, 1 apotik, 3 rumah tinggal dirusak dan dibakar, 2 gereja dirusak, 1 bioskop dirusak.

c. Kronologi Peristiwa Tanjung Priok Versi Lembaran Putih Petisi 50

Lembaran Putih 22 berisi keprihatinan tentang dikeluarkannya keterangan sepihak oleh pemerintah Orde Baru (Lembaran Putih Peristiwa September '84 di Tanjung Priok dalam Fatwa, 2005). Lembaran Putih tentang Priok 1984 ditandatangani oleh: Azis Saleh, Ali Sadikin, H.R.Dharsono, Suyitno Sukirno, Iman Santoso, Syafrudin Prawiranegara, Darsyaf Rahman, Wachdiat Sukardi, Burhanuddin Harahap, Abdulrahman Sy., Mohammad Sanusi, Dody Ch.Suriadiredja, M.Rajab Ranggasoli, Slamet Bratanata, Bakri A.G Tianlean, M.Rajab Ranggasoli, M. Muis,

³ Berita Acara Pemeriksaan (Tempat Kejadian Perkara) dari Polres Jakarta Utara 13 September 1984.

A. Amin Ely, Anwar Haryano, Hamzah Hariandjo, N.P. Siregar, Sofwan A.M., A.M.Fatwa. Jika peristiwa Tanjung Priok sendiri adalah sebuah musibah maka penanda tangan Lembaran Putih 22 menganggap keterangan sepihak pemerintah tersebut sebagai “musibah dalam musibah”.

Para penanda tangan Lembaran Putih 22 kemudian berusaha menyadarkan masyarakat bahwa di balik peristiwa Tanjung Priok sebenarnya terdapat musibah yang lebih mendasar, yaitu sistem politik dan kondisi masyarakat yang mengantarkan peristiwa 12 September 1984 itu. Lembaran Putih membuat versi yang berbeda dengan versi pemerintah dalam menerangkan Peristiwa Tanjung Priok sebagai berikut.

Tanggal 8 September 1984, dua petugas Koramil, tanpa membuka sepatu, memasuki Mushala as-Sa’adah di gang IV Koja. Mereka menyiram pengumuman yang tertempel di tembok mushala dengan air got, padahal pengumuman itu hanyalah undangan pengajian Remaja Islam Jalan Sidang Raya. Pada hari Minggu, 9 September 1984, kejadian di Mushala as-Sa’adah menjadi pembicaraan masyarakat. Tidak ada usaha pihak berwajib untuk menawarkan penyelesaian kepada jamaah.

Tanggal 10 September 1984, beberapa anggota jamaah Mushala as-Sa’adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori mushalla mereka. Kemudian terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya dileraikan oleh dua orang jamaah mushala yang kebetulan lewat. Usul kedua orang yang terakhir agar semua pihak minta

penengahan pada ketua RW, diterima. Sementara itu, saat pembicaraan sedang berlangsung, sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan, membakar sepeda motor petugas Koramil. Kodim yang diminta bantuan oleh Koramil mengirimkan sejumlah tentara dan melakukan penangkapan. Tertangkaplah empat orang jamaah, Syafwan bin Sulaeman termasuk di dalamnya Ketua Mushala as-Sa’adah⁴

Tanggal 11 September 1984, Amir Biki menghubungi pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan empat orang yang diyakini tidak bersalah. Tanggal 12 September, dalam suasana yang dipertegang oleh kejadian penahanan empat orang jamaah tersebut, acara pengajian Islam yang memang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, berlangsung di Jalan Sindang Raya. Dalam pengajian ini, Amir Biki tidak menjadi penceramah karena memang tidak pernah bersedia naik mimbar. Akan tetapi, dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh jamaah, massa mendesak Amir Biki naik mimbar. Pukul 23.00 para tahanan belum juga dibebaskan, Amir Biki dikuti oleh jamaah pengajian berangkat ke Kodim. Massa membawa bendera Merah Putih dan bendera hijau bertuliskan” *Laila ilaaha illallah*”. Sebelum massa bergerak, Amir Biki meminta massa berlaku tertib.

⁴ Diperkuat dengan pernyataan wawancara dengan Bapak Sahi tanggal 07 Juli 2010 dan Bapak Syafwan tanggal 10 Juli 2010. (lihat lampiran transkrip wawancara). Dapat dilihat pula pada kesaksian BAP Resume dengan terdakwa Mayjend. Pranowo.

Ketika sampai di dekat kantor Polres, massa yang bergerak di bawah pimpinan Amir Biki, tercegat oleh pasukan keamanan. Pasukan keamanan yang diturunkan dari beberapa truk juga menggunakan kendaraan lapis baja (panser dari Yon Kav/Serbu). Gerakan massa langsung dibubarkan dengan senjata

Setelah penanganan di tempat kejadian perkara, para korban yang mengalami luka-luka maupun tewas di tempat kejadian dibawa ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan truk yang sebelumnya digunakan untuk membawa pasukan. Beberapa korban yang sementara dirawat di rumah sakit Koja dan rumah sakit Suka Mulia kemudian dievakuasi ke RSPAD. Ada salah satu narasumber yang menceritakan hal ini. Bapak Amir Mahmud menyatakan bahwa ia sempat dievakuasi ke rumah sakit Koja sebelum dibawa ke RSPAD Gatot Subroto.

Sesuai dengan perintah Mayjend. Try Sutrisno yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V/ Jaya. Ia datang ditemani Jenderal L.B Moerdani. Dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan RSPAD menunjukkan jumlah korban yang dirawat adalah 36 orang, semuanya dapat disembuhkan. Jumlah korban yang diberi pengobatan tetapi tidak dirawat adalah 19 orang. Jumlah korban meninggal sebanyak 23 orang. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai organisasi politik maupun organisasi masyarakat di Indonesia⁵.

Dari tiga versi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ada beberapa

faktor yang menyulut peristiwa Priok 1984. Dari keterangan pemerintah dinyatakan bahwa kelompok pengajian yang ada di Tanjung Priok sebagai pemicu peristiwa tersebut dengan melakukan tindakan provokasi, selain itu dikatakan juga bahwa para penceramah menghasut massa dengan ceramah-ceramah anti pemerintah. Sedangkan Versi Lembaran Putih menerangkan bahwa pemicu peristiwa Priok 1984 karena sikap aparat keamanan yang tidak menghormati musholla sebagai tempat ibadah⁶ yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada persidangan. Adanya pengajian-pengajian yang diadakan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk aksi protes akibat kebijakan pemerintah tersebut.

Peristiwa Tanjung Priok dilihat berdasar teori *Collective Action* adalah sebuah gerakan sosial yang berdasarkan kepentingan tertentu dan untuk mencapai tujuannya dilakukan usaha mobilisasi atau kegiatan-kegiatan yang bersifat reaktif. Reaksi pemerintah terhadap Peristiwa Tanjung Priok adalah dapat dilihat sebagai polity model (*Government, Contender, and Coalition*). Aksi kolektif adalah orang-orang yang bertindak bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Komponennya adalah *common interest, organization,*

⁶ Mary J. Douglas dalam bukunya *Kemurnian dan Bahaya (Analisis Konsep Pencemaran dan Tabu)* (1966) mencoba menjelaskan perbedaan yang kudus (suci), bersih, dan najis dalam masyarakat yang berbeda. Dalam masyarakat di Indonesia khususnya umat Islam, masjid atau musholla merupakan tempat ibadah yang dianggap suci. Pada kasus peugas Koramil (Sersan Hermanu) yang masuk musholla memakai sepatu dan menyiram musholla dengan air selokan adalah hal tabu dan melawan norma agama. Akibatnya muncul reaksi keras dari masyarakat muslim di sekitar tempat kejadian .

⁵ Sinar Harapan ,14 September 1984 dan Kompas, 15 September 1984.

mobilization, opportunity dan *colletive action*. Kepentingan bersama merupakan titik tolak aksi kolektif. Penerapan azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya azas di Indonesia membawa pengaruh besar bagi organisasi-organisasi di Indonesia, khususnya organisasi Islam. Masyarakat Tanjung Priok secara struktur bukanlah masyarakat yang masuk dalam organisasi tertentu. Namun kesamaan paham yang mereka percaya melalui simbol Islam menjadikan mereka memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai tindakan sosial berorientasi nilai (Jones, 2009). Menurut Tilly organisasi berkenaan dengan struktur kemasyarakatan yang mana memungkinkan usaha atau aksi untuk mencapai kepentingan masyarakat. Organisasi sebagai alat untuk memobilisasi dengan cara mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan aksi kolektif secara lebih optimal. Organisasi ini digerakkan oleh orang-orang yang memiliki persamaan kepentingan, semakin erat hubungan antar anggota akan semakin kuat organisasi itu. Dalam kasus Tanjung Priok organisasi lebih kepada kelompok masyarakat yang menghadiri tabligh akbar. Hal ini didukung dengan kegiatan mobilisasi yang menurut Tilly berkenaan dengan pengontrolan kelompok atau organisasi terhadap sumber-sumber kekuatan yang ada dalam masyarakat, yang diperlukan dalam aksi yang bersama. Sumber-sumber itu bisa berupa tenaga kerja, pikiran, harta benda, senjata, ataupun suara dalam pemilihan. Mobilisasi juga berkaitan dengan cara yang

ditempuh oleh kelompok atau organisasi, untuk memperoleh sumber-sumber kekuatan, membuat anggota bersedia melakukan aksi. Mobilisasi kasus Tanjung Priok dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dimasyarakat Tanjung Priok misalnya Amir Biki dan beberapa tokoh mubaligh di Tanjung Priok. Tokoh Amir Biki sebenarnya telah banyak memfasilitasi dan mengkoordinir kelompok-kelompok pengajian yang diikuti oleh masyarakat Tanjung Priok⁷. Sosok Amir Biki tidak hanya dikenal masyarakat Tanjung Priok namun ia juga dekat dengan aparat keamanan setempat. Kedekatannya dengan aparat keamanan sebenarnya bukan saja karena dia seorang aktifis tetapi dia adalah seorang pengusaha yang ikut andil dalam memberikan bantuan finansial kepada aparat pemerintah saat itu. Selain itu Amir Biki dikenal dekat dengan para ulama, sehingga ia akan dengan mudah mengundang para mubaligh untuk berceramah sebagai salah satu upaya bentuk protes terhadap pemerintah.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa andil para mubaligh sangat berkaitan dengan psikologi masyarakat Tanjung Priok. Para pendakwah terus mengingatkan kepada jamaahnya agar selalu konsisten kepada Islam sebagai asas dalam kehidupan.⁸ Ungkapan-ungkapan para pendakwah ini banyak menarik perhatian umat yang kondisi sosialnya juga turut mendukung keadaan

⁷ Lihat wawancara dengan Beni Biki (Adik kandung Amir Biki) dan Sahi

⁸ Hal ini yang kemudian peneliti menarik kesimpulan bahwa seringkali gerakan ini dikaitkan dengan gerakan sosial yang mengarah pada gerakan Islam radikal atau fundamental.

persoalan negara pada saat itu yang akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok pengajian Tanjung Priok.

Kesempatan menurut Tilly berkaitan dengan hubungan antara kelompok dengan dunia sekitarnya. Kesempatan terdiri atas tiga bagian, yaitu *power* atau kekuatan, *repression* atau penekanan dan *threat* atau ancaman. Kekuatan yaitu kemampuan untuk mengunggulkan kepentingan sendiri atas kelompok pesaing lain. Penekanan yaitu kelompok lain yang dapat ditekan atau didukung berdasar kekuatan masing-masing kelompok. Ancaman yaitu sebagai akibat berinteraksi terhadap kelompok harus menguntungkan sehingga mempunyai kesempatan mewujudkan dalam bentuk aksi. Sebaliknya kelompok sosial lain dapat membahayakan eksistensi kelompoknya sehingga dianggap ancaman.

Kekuatan pada kasus Tanjung Priok adalah kelompok pengajian tabligh akbar yang mengalami penekanan (*repression*) terkait dengan adanya penodaan tempat ibadah oleh salah satu petugas Koramil setempat dan mengakibatkan empat orang warga setempat ditahan. *Threat* atau ancaman dalam hal ini merupakan aksi pemerintah dalam kebijakan pemberlakuan azas tunggal yang mengakibatkan umat Islam khususnya merasa ideologinya terancam, begitupun sebaliknya pemerintah merasa terancam dengan kegiatan pengajian-pengajian yang dianggap anti pemerintah. Amir Biki sebagai seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat Tanjung Priok diminta untuk membantu menyelesaikan masalah

penangkapan tersebut agar segera dibebaskan.

Tilly juga membangun model analisis yaitu *Polity Model* yang di dalamnya terdapat komponen *Government*, *Contender*, *Polity* dan *Coalition*. *Government* atau pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan yang dapat memaksakan tujuan para anggotanya. Pemerintah Orde Baru merupakan lembaga yang mempunyai kebijakan Azas Tunggal yang menghendaki kebijakan tersebut dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. *Contender* dalam hal ini adalah kelompok pengajian tabligh akbar Tanjung Priok yang dipimpin oleh Amir Biki untuk menekan pemerintah membebaskan 4 orang warga masyarakat setempat. Dalam hal ini Amir Biki merupakan tokoh perwakilan kelompok pengajian tabligh akbar masyarakat Tanjung Priok yang menentang kebijakan satu-satunya asas Pancasila. *Polity* adalah kebijakan pemerintah yang menahan 4 orang warga masyarakat setempat, sedangkan Amir Biki menjembatani keinginan masyarakat yang ingin 4 orang tahanan tersebut dibebaskan karena menurut kelompok masyarakat tersebut kebijakan yang diambil pemerintah yang menahan orang-orang tersebut tidak tepat.

Menurut Tilly ada tiga unsur atau sifat penting dalam *collective action* yaitu *competitive*, *reactive* dan *proactive*. *Competitive* artinya aksi menuntut dari satu kelompok terhadap kelompok pesaing. merupakan aksi *competitive* saat itu. Aksi ini dipicu dari tuntutan beberapa aparat pemerintah yang meminta kegiatan tabligh akbar ditiadakan dengan cara menegur halus

sampai cara kasar dengan merusak pamflet dengan menyiram memakai air selokan atau dan dengan sengaja mengotori kesucian tempat ibadah. Kelompok masyarakat yang melakukan tuntutan kepada Koramil untuk membebaskan keempat orang rekannya merupakan aksi *reactive*, dimana dari pihak penguasa saat itu menganggap tindakan ini adalah membahayakan keamanan lingkungan. Secara umum gambaran peristiwa Priok 1984 merupakan aksi *reactive* dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menerapkan Azas Tunggal Pancasila yang melahurkan aksi protes di masyarakat khususnya organisasi- organisasi Islam.

Dampak Peristiwa Tanjung Priok 1984 Terhadap Masyarakat

a. Penyelesaian Konflik Peristiwa Tanjung Priok 1984

Tuntutan keluarga korban peristiwa Priok 1984 untuk meminta keadilan atas peristiwa Priok 1984 sebenarnya sudah dimulai sejak masa Orde baru. Bergulirnya era reformasi memang membuka ruang kemungkinan bagi korban dan keluarga korban peristiwa Priok untuk membuka tabir masa lalu mereka yang selama ini ditutupi. Dengan dibantu pegiat kemanusiaan, mereka melakukan artikulasi ingatan mereka melalui berbagai cara. Bila ditelusuri dari berbagai literatur maupun narasumber. Sudah banyak upaya ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini. Upaya penyelesaian tersebut telah dilakukan pada tatanan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemerintah dalam menyikapi tuntutan para korban peristiwa Priok untuk membuka

kembali kasus tersebut juga ditanggapi dengan berbagai cara. Upaya-upaya dilakukan seperti disetujuinya pembentukan peradilan HAM Ad Hock.

Bagian ini ingin menunjukkan bahwa jejak-jejak peristiwa Tanjung Priok tidak hilang begitu saja. Berhembusnya arus reformasi juga mendorong para korban Priok yang lain membuat organisasi sejenis. SONTAK (Solidaritas Nasional untuk Korban Priok) yang dipimpin Syarifin Maloko, dan KOMPAK (Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan) yang dipimpin Yayan Hendrayana. dua organisasi itu merupakan upaya para korban Priok yang melakukan penuntutan agar kasus itu dibuka kembali. Kendati munculnya beragam organisasi yang mempresentasikan diri bagian dari korban, mereka tetap berjalan seiring berjuang mengangkat kasus itu. Perjuangan untuk mendapatkan simpati publik itu, antara lain diwujudkan dalam bentuk diskusi, audiensi, tabligh akbar, hingga demonstrasi (Muhammad, 2009).

Bagi para korban dan keluarga korban, dibukanya kembali kasus itu melebihi keinginan sederhana mereka. Sebelumnya, mereka hanya ingin pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hal ini senada dengan pernyataan Yudi Wahyudi "kalo aparat yang merasa salah ya udah. Saya mau kok memaafkan dia".

Namun di tengah perjuangan para korban dalam memperjuangkan kasus ini, ada jalan lain yang ditempuh untuk menyelesaikan peristiwa Priok 1984 dengan cara *Ishlah*. Perjuangan mereka yang sebelumnya cukup solid pun akhirnya menjadi lemah saat

dihadapkan kepada tawaran yang menggiurkan.

b. Penyelesaian Dengan Cara *Ishlah*⁹

Dalam memperjuangkan kasus tersebut ke pengadilan, tiba-tiba muncul tawaran berdamai dengan jalan *Ishlah*. Isu berdamai melalui *Ishlah* inilah yang kemudian memecah soliditas dan solidaritas sesama korban, yaitu antara mereka yang ingin mengingat masa lalu dengan melakukan pengungkapan di meja hukum dan melupakan masa lalu dengan berdamai dengan pelaku yang ditandai gugurnya pengungkapan kebenaran lewat jalur pengadilan.

Perjuangan mereka yang sebelumnya cukup solid pun akhirnya menjadi lemah saat dihadapkan kepada tawaran yang menggiurkan. Tawaran berdamai ini membuat solidaritas mereka mulai retak. Akhirnya, terjadilah dua kubu di antara para korban dan keluarga korban Priok, yaitu antara mereka yang ingin berdamai dengan masa lalu dan mereka yang ingin meneruskan pengungkapan kebenaran kasus Priok di pengadilan. Respon para korban dalam menyikapi masalah *Ishlah* memang beragam.

Dari berbagai penuturan para korban dan keluarga korban Priok mengenai *Ishlah* dapat diambil kesimpulan bahwa korban yang setuju dengan adanya *Ishlah* karena jalan tersebut dianggap jalan yang terbaik atas segala perjuangan yang mereka lakukan bertahun-tahun sejak pemerintah Orde Baru hingga reformasi bergulir. Walaupun terdapat kekecewaan karena kesepakatan tersebut

akhirnya tidak terkompensasi dengan baik. Sedangkan bagi yang menolak *Ishlah*, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tetap harus dilakukan, mereka menganggap *Ishlah* hanya sebagai jalan untuk menutupi masalah agar terhindar dari hukum.

Akhirnya *Ishlah* menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus peristiwa Priok ini. Terlepas dari berbagai kepentingan dan pro kontra yang terjadi dikalangan korban. Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Utara, 1 Maret 2001 menjadi saksi puncak pecahnya solidaritas mereka. Karena pada tanggal tersebut telah diadakan perjanjian damai lewat *Ishlah* antara pelaku (militer) dan sebagian besar korban peristiwa Priok yang diwakili oleh Tim Tujuh (Kalangan militer diwakili oleh Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Rudolf.A.Butar-Butar, Supriyanto, dan H.Mattoani, BA sebagai pihak kedua, sedangkan pihak pertama yang diwakili oleh Tim Tujuh adalah Syarifuddin Rambe, Ahmad Sahi, Syafwan Sulaiman, Nasrun, HS, Asep Sapruddin, Sudarso, dan Siti Chotimah¹⁰).

Kesepakatan perjanjian damai *Ishlah* ini dilakukan dua kali. Pertama, 1 Maret 2001, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Sebanyak 86 korban dan keluarga korban menandatangani kesepakatan Piagam *Ishlah* yang diwakili oleh Tim Tujuh. Pihak aparat keamanan yang terlibat dalam penanganan peristiwa Priok diwakili Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, Soekarno, Rudolf Adolf Butar Butar, Sriyanto, dan H.Mattaoni, BA. Sedangkan yang berperan sebagai saksi

⁹ Ejaan mengikuti yang tertera di Piagam *Ishlah*

¹⁰ Lihat Piagam *Ishlah* tentang Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.

adalah Pangdam Jaya Mayor Jendral Bibit Waluyo dan Nurcholish Madjid¹¹. Kedua, 18 September 2001. *Ishlah* yang dilakukan dengan keluarga korban yang terdiri dari sebagian anggota keluarga Amir Biki¹².

Tabel 1. Pendapat yang Muncul Mengenai *Ishlah* Dari Para Korban

No	Nama Korban	Keputusan Ishlah	Argumen
1	Yusron bin Zaenuri	Tidak setuju	Ishlah dimunculkan sebelum diadakan persidangan, sehingga tujuan dan perjuangan korban dan keluarga korban terpecah belah.
2	Beni Biki	Tidak setuju	Tidak sesuai dengan prosedur keilmuan, secara personal tidak mau mengkhianati saudaranya yaitu Alm. Amir Biki. Berbeda dengan keputusan keluarga besarnya yang menyetujui Ishlah.
3	A. Sahi	Setuju	- Adanya oknum diluar korban dan keluarga korban yang memanfaatkan kasus Priok 1984 -untuk kepentingan pribadi. Bosan dengan

¹¹ Menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai mediator *Ishlah* yaitu orang yang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat. Ini berpengaruh dalam membangun *image* masyarakat bahwa yang mereka lakukan *Ishlah* adalah benar.

¹² Lihat Ikrar Bersama antara aparat keamanan yang bertugas dan keluarga Besar Biki. 18 September 2001. (lampiran). Tidak semua keluarga Amir Biki yang pro dengan *Ishlah*. Lihat pernyataan Beni Biki. Di sana terlihat secara implisit bahwa dia menentang *Ishlah*.

			proses keadilan yang tak kunjung menuai hasil. - Saran dari tokoh agama yaitu Cak Nur bahwa <i>Ishlah</i> jalan yang terbaik.
4	Syafwan bin Sulaeman	Setuju	Perjuangan yang tak kunjung berhasil menyebabkan adanya titik jenuh di kalangan korban
5	Yudhi Wahyudhi	Tidak setuju	Harus diproses secara hukum dengan jelas.
6	Misdi	Setuju	Ingin damai dengan <i>Ishlah</i>
7	Amir Mahmud	Setuju	Tidak mau ambil pusing, jalan terbaik ikut dengan imam

Bagi yang menerima keputusan dengan berishlah kejadian ini dianggap tuntas. Seperti beberapa keterangan narasumber di atas yang pro *Ishlah*. Bahwa mereka melakukan *Ishlah* sebagai upaya kepedulian mereka agar masalah yang dialami oleh bangsa ini berkurang, disamping itu mereka telah lelah dengan segala proses hukum yang semakin membingungkan mereka terhadap kasus ini, sehingga *Ishlah* merupakan angin segar untuk mereka dalam menuntaskan kasus ini.

Kesepakatan yang mereka buat juga terjadi karena adanya faktor sosial ekonomi¹³. Dari wawancara yang dilakukan terlihat bagaimana keadaan korban dan keluarga

¹³ Dilihat dari keadaan sehari-hari para narasumber.

korban. Dalam biodata yang diberikan terlihat beberapa yang berstatus pengangguran. Sedangkan bagi yang kontra *Ishlah*. Hal ini tentu meyorutkan solidaritas sesama korban. Di satu sisi mereka ingin kebenaran benar-benar terungkap dalam pengadilan. Namun di sisi lainnya upaya yang mereka lakukan sampai saat ini belum bisa terealisasikan sepenuhnya.

KESIMPULAN

Pertama, kondisi sosial masyarakat Tanjung Priok pada tahun 1980-an dilihat dari teori determinasi lingkungan yang mengemukakan bahwa semua kehidupan dan aktivitas manusia dipengaruhi dan tergantung pada pemberian alam di sekitarnya. Manusia cenderung pasif dalam menghadapi tantangan alam, respon terhadap alam hanya berupa respon menerima apa adanya. Dengan kata lain manusia tidak dapat menentukan hidupnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian, tingkah laku, kebiasaan, serta kebudayaan manusia pada lingkungan tertentu. Dengan kondisi geografis Tanjung Priok yang panas, gersang dan didukung oleh penduduk Tanjung Priok yang mayoritas pendatang yang menjalani kehidupan dengan keras agar dapat mempertahankan hidup bertindak untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk menyambung hidup. Upaya yang dilakukan ini dapat dikatakan tindakan sosial yang menerima apa adanya kondisi lingkungan alam yang ada. Kehidupan di wilayah ini dapat dikatakan sebuah deskripsi umum daerah Jakarta Utara. Pemukiman padat penduduk dengan kondisi ekonomi lemah, tingkat pendidikan rendah dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Terlihat

dari air selokan dan kali yang pekat serta berbau yang tidak sedap. Keseluruhan kawasan itu memang nampak kumuh dengan warga yang mayoritas golongan menengah ke bawah. Kondisi semacam ini menyebabkan interaksi antar penduduk menjadi sangat tinggi. keadaan masyarakat yang heterogen menyebabkan adanya keresahan sosial ekonomi yang melingkupi masyarakat Priok; kesenjangan sosial, kemiskinan adalah realitas sosial permasalahan Priok

Kedua, peristiwa Priok 1984 merupakan sebuah peristiwa yang diawali dengan adanya suasana yang telah memanas karena berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yaitu keadaan sosial, ekonomi, pendidikan dan kondisi keagamaan serta watak masyarakat pelabuhan yang tercermin pada masyarakat Tanjung Priok ditambah rencana pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Isu-isu yang ada pada masa itu seperti pelarangan berjilbab, keluarga berencana serta isu utama adalah penerapan satu-satunya asas yang dianggap mendeskreditkan umat Islam Peristiwa itu terjadi ketika pemerintah Soeharto memaksakan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas dan melarang asas lain sebagai asas partai, termasuk ideologi Islam.

Ketiga, peristiwa Priok 1984 sejalan dengan Teori *Collective Action* yaitu sebuah gerakan sosial yang berdasarkan kepentingan tertentu dan untuk mencapai tujuannya dilakukan usaha mobilisasi atau kegiatan-kegiatan, adapun sifat dari aksinya adalah reaktif. Reaksi pemerintah terhadap Peristiwa Tanjung Priok adalah dapat dilihat sebagai polity model (*Government, Contender, and Coalition*). Aksi

kolektif adalah orang-orang yang bertindak bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Secara umum gambaran peristiwa Priok 1984 merupakan aksi *reactive* dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menerapkan Azas Tunggal Pancasila yang melahirkan aksi protes di masyarakat khususnya organisasi-organisasi Islam.

Keempat, dampak Peristiwa Tanjung Priok 1984 terhadap korban pada masa Orde Baru sangat represif, selain intimidasi yang dilakukan terhadap korban dan keluarga korban, masyarakat Tanjung Priok secara umum juga terkena dampak tersebut. Secara sosial pengucilan terhadap korban peristiwa Priok sangat dirasakan hingga terutama dalam kehidupan ekonomi mereka. Dalam upayanya untuk mencegah agar pelanggaran kemanusiaan pada masa lalu yang tak terungkap, penanggungjawab keamanan (aparatur keamanan) pada masa setelah peristiwa Priok mencoba mendekati korban dan berusaha mendapatkan jaminan agar kasus Priok 1984 tidak dibawa ke pengadilan. Jaminan itu diaplikasikan dalam bentuk perdamaian yang disebut *Ishlah*. Proses perdamaian (*Ishlah*) keluarga korban peristiwa Priok 1984 merupakan kesepakatan antara korban dan penanggung jawab keamanan pada waktu untuk saling memaafkan walaupun ada perbedaan pandangan dan sikap sesama korban mengenai jalan *Ishlah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Acara Pendapat (Resume) kasus Priok dengan terdakwa Mayjend. Pranowo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2001

- Berita Acara Pemeriksaan (Tempat Kejadian Perkara) dari Polres Jakarta Utara 13 September 1984.
- BPS Jakarta Utara tahun 1985 mengenai Perkembangan Wilayah Jakarta Utara 1985
- Fatwa, AM. (2005). Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Dharmapena.
- Feillard, Andree. (2008). NU vis a vis Negara. Yogyakarta: LkiS.
- Furchan, Arief. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional
- Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Jones, Pip. (2009). Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kompas, Jakarta 14 September 1984
- Kompas, Jakarta, 15 September 1984
- Kompas, Jakarta 16 September 1984
- Kuntowijoyo, 2001. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Mary Douglas, (2002) *Kemurnian dan Bahaya: Sebuah Analisis Konsep Polusi dan Tabu* Abingdon: Routledge.
- Muhammad, Akmaliah Wahyudi. 2009. Menggadaikan Ingatan; Politisasi Islah dalam Kasus Priok. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- PSPI. 1998. Tanjung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa. Sebuah Fakta dan Data. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sinar Harapan, Jakarta, 14 September 1984
- Sinar Harapan, Jakarta, 15 September
- Sjamsuddin, H. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud.
- Suharko, (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Tanuredjo, Budiman. (2003). Militer Dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Era Soeharto (Studi Kasus Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli 1996). Tesis. Bidang Ilmu Politik UI. Tidak diterbitkan.
- Tempo, Jakarta, 22 September 1984
- Tilly, Charles. (1978). From Mobilization to Revolution. Philippines: Addison Wesley Publishing Company Inc.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (2007). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka